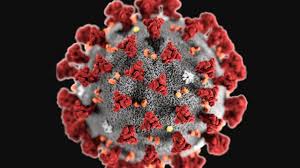
**NTB ALOKASIKAN RP80 MILIAR UNTUK WARGA MISKIN ATASI DAMPAK COVID-19**



https://www.google.com/search

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar untuk program jaring pengaman sosial yang diperuntukkan kepada warga miskin untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat wabah virus corona jenis baru penyebab COVID-19. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Ridwan Syah , Minggu mengatakan, konsep jaring pengaman sosial (JPS) yang disiapkan Pemprov NTB tidak saja menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup minimal, namun juga bagaimana menciptakan stimulus ekonomi di daerah.

“Dalam penanganan wabah ini kita melawan corona sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Karenanya dalam konsep yang kita siapkan kita beri nama JPS Gemilang,” ujarnya. Ia menjelaskan, JPS Gemilang ini rencananya akan meng-cover kebutuhan hidup masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak ter-cover JPS Pusat selama 3 bulan dalam bentuk seperti sembako, produk-produk perikanan, obat-obatan, vitamin, dan masker.

“Diarahkan agar menggunakan produk lokal sekaligus untuk memberdayakan UKM dan IKM di NTB,” kata Koordinator Gugus Tugas Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 Pemprov NTB itu. Ia menyebutkan, total penerima bantuan paket sembako ini sejumlah 105.000 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari 73.000 KK miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS pusat (PKH dan Bantuan Sembako) dan 32.000 KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak. “Sedangkan anggaran JPS Gemilang yang disiapkan selama 3 bulan sementara dialokasikan sebesar Rp80 Miliar yang bersumber dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), realokasi belanja, serta anggaran program-program lain yang dijadwal ulang. Pembiayaan dan distribusi bantuan JPS juga akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ridwan menyatakan, mengenai hal lainnya, saat ini program JPS pemerintah pusat berupa pembebasan dan keringanan tagihan listrik untuk 450 VA dan 900 VA sudah bisa dinikmati masyarakat. Keringanan ini diberikan kepada 868.637 pelanggan se-NTB, dengan kategori gratis 100 persen untuk pelanggan R1-450 VA sebanyak 566.335 pelanggan dan diskon 50% untuk pelanggan R1-900 VA sebanyak 302.302 pelanggan.

“Bantuan keringanan pembayaran listrik ini juga akan diberikan selama 3 bulan mulai dari bulan April sampai dengan Juni 2020,” katanya. (Ant)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/ntb-alokasikan-rp80-miliar-untuk-warga-miskin-atasi-dampak-covid-19/>06/04/2020
2. https://www.antaranews.com/berita/1404818/ntb-alokasikan-rp80-miliar-untuk-warga-miskin-atasi-dampak-covid-19/ 05/04/2020;
3. https://regional.kompas.com/read/2020/04/06/18150561/antisipasi-dampak-sosial-ekonomi-corona-pemprov-ntb-kucurkan-rp-80-m

**Catatan**

Ditengah kodinsi bernegara saat ini yang mengalami defisit penerimaan pendapatan, ditengah pandemi virus corona Covid-19, membuat pemerintah selaku penyelanggara negara harus berhitung dan memikirkan kembali politik anggaran yang akan dilaksanakan dalam APBN 2020. Baru-baru ini pemerintah telah mengalokasikan setidaknnya 110 Tryliun untuk menanggulangi dampak pandemic agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok nya. [vide: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=1] selanjutnya pemerintah pusat menekantkan kepada pemerintah daerah hingga pemerintahan desa untuk bekerjasama mengatasi covid -19.

Dalam pasal 8 UU nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, selama tanggap darurat seperti saat ini, memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak, tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar terkait kesehatan atau medis namun juga kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 8, berbunyi:

*“Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina”*

Penyaluran harus dilaksanakan sesegera munkin secara cepat dan tetap adalah jaring pengaman sosial, harus dilakukan dengan seefisien mungkin, dengan menggunkan cara-cara yang praktis dan tidak menyulitkan masyarakat. [vide: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19?page=1]